

**ALAT KERUK RP 12 MILIAR MILIK PEMKOT SAMARINDA MANGKRAK,
POKJA 30 DESAK PERIKSA PENGADAAN ALAT**



sumber: TribunKaltim.co

TRIBUN KALTIM, Kondisi Water Master atau alat keruk asal Finlandia milik Pemkot Samarinda mangkrak sejak 2015. Kondisi alat keruk seharga Rp12 M ini mendapat tanggapan kritisi dari Pokja 30 Kaltim. Direktur Pokja 30, Buyung Marajo menilai ada kejanggalan dari kondisi tersebut. Buyung meminta agar DPRD dan Inspektorat segera memeriksa persoalan ini. Menurut Buyung, dana tersebut berasal dari publik dan wajib dipertanggungjawabkan oleh pemerintah.

“DPRD harus menjalankan tugasnya sebagai pengawasan. Dan inspektorat juga harus periksa.” ujar Buyung saat ditanya, Sabtu (25/1/2020). Menurut Buyung, publik punya hak itu mengetahui persoalan tersebut. Katanya, kasus mangkrak alat ini harus diketahui oleh masyarakat. Padahal peran alat vital ini cukup vital sebagai salah satu upaya penanggulangan banjir Samarinda. “Harus ditelisik lebih dalam, karena ini menyangkut kinerja Pemkot Samarinda untuk mengurangi dampak banjir,” kata dia.

Di samping itu, ia meminta agar inspektorat benar-benar melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan alat tersebut. Alat keruk sungai yang diharapkan sesuai dengan spesifikasi kontrak. “Coba diperiksa juga alat itu, jangan sampai itu alat bekas tapi dibeli dengan harga baru,” pesannya. Sebab sampai sekarang belum diketahui pasti penyebab mangkraknya alat tersebut,” ujarnya. Diakhir, ia meminta hasil pemeriksaan diekspos ke publik. Dari hasil pemeriksaan warga bisa menilai kinerja Pemkot Samarinda terkait penanggulangan banjir. “Kalau nanti ada temuan berarti memang Pemkot tidak serius mengurus banjir,” pungkasnya. Media ini mencoba menghubungi Kepala Bidang Bina Marga

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Deni Alfian beberapa kali. Hanya saja yang bersangkutan tak merespon ketika hendak dikonfirmasi.

Danrem 091/ASN Brigjen TNI Widi Prasetyono mendampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat Letjen TNI Doni Monardo di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) meninjau kondisi terkini bencana dan pascabanjir. Terutama banjir. Terutama banjir yang melanda Kota Samarinda khususnya di Kecamatan Sambutan dinilai telah menyebabkan lahan persawahan para petani gagal panen, Rabu (22/1/2020). Sekitar 81 hektare lahan gagal panen. Areal sawah gagal panen yang terdampak banjir di Pelita 6 Rt 16, 17, 18 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Samarinda. Lahan yang mengalami gagal panen milik kelompok tani Berkat Usaha 20 Ha, Bina Usaha 15 Ha, Pelita Berkat Mandiri 14 Ha, Rahmad Abadi 16 Ha, Agro Wisata 16 Ha, total 81 Ha.

Sumber berita:

1. <https://kaltim.tribunnews.com/2020/01/26/alat-keruk-rp-12-miliar-milik-pemkot-samarinda-mangkrak-pokja-30-desak-periksa-pengadaan-alat>, *Alat Keruk Rp12Miliar Milik Pemkot Samarinda Mangkrak, Pokja 30 Desak Periksa Pengadaan Alat*, diposting 26 Januari 2020, diakses 28 Januari 2020
2. <https://kaltim.tribunnews.com/2020/01/22/kepala-bnpb-doni-monardo-kunjungi-samarinda-lihat-kondisi-terkini-bencana-dan-pascabanjir>, *Kepala BNPB Doni Monardo Kunjungi Samarinda, Lihat kondisi Terkini Bencana dan Pascabanjir*, diposting 22 Januari 2020, diakses 28 Januari 2020

Catatan:

- DPRD memiliki tiga fungsi yaitu: Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD), dan Pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa DPRD Provinsi mempunyai tugas: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Demikian juga DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 365 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Watermaster merupakan alat keruk spesialis perairan dangkal. Pengadaan barang/jasa dibawah tanggal 1 Juli 2018 diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten / Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
- Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana:
 - (1) Untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - (2) Pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan BNPB
 - (3) BNPB mengadakan rapat koordinasi dengan BPBD, sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Pokja 30 merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menjadi bagian dari Seknas Fitra yang wilayah kerjanya meliputi Provinsi Kaltim, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Bulungan, dan Kab. Berau. FITRA (Forum Indonesia Untuk Transparan Anggaran) adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kontrol sosial untuk transparansi proses-proses penganggaran negara. Organisasi ini bersifat otonom, non profit (nirlaba), dalam melaksanakan gerakannya bersifat independen. FITRA berdiri pada September 1999 yang diprakarsai oleh aktivis LSM dan kalangan intelektual di Jakarta yang konsen pada isu demokratisasi, khususnya otonomi daerah dan good governance, yang mulai marak sejak Indonesia memasuki era transmisi demokrasi.